

ABSTRAK

Dalam perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, para pihak yang berselisih, baik Pekerja maupun Pengusaha dapat sampai pada tahap pengajuan gugatan dan pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial akan menghasilkan Putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja, persoalannya belum selesai. Dalam praktik, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh Pengusaha, tidak berhasil pula dilaksanakan eksekusi dengan paksa oleh Pengadilan karena keterbatasan dana, sulitnya mencari dokumen benda milik termohon eksekusi dan tidak dijalankannya permohonan eksekusi oleh Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan mengetahui pelaksanaan eksekusi pada Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar ilmu hukum meliputi penemuannya tidak terjebak pada kemiskinan yang relevan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai data pelengkap. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan di Pengadilan Negeri Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari data yang diperoleh. Adapun metode penyajian data dilakukan secara *editing* sehingga hasil analisis menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Prosedur pelaksanaan eksekusi Putusan PHI pada Pengadilan Negeri berpedoman pada Hukum Acara Perdata dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Direktur Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. Kedua, Pelaksanaan Eksekusi pada Putusan PHI Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg terlaksana pada tanggal 6 mei 2021. Jenis eksekusinya adalah pembayaran sejumlah uang berupa gaji untuk bulan september dan Oktober 2019 serta hak - hak pemutusan hubungan kerja yaitu sebesar Rp 32.446.500 diberikan kepada Diyan Prehantoro dan sebesar Rp 30.396.500 diberikan kepada Asbat oleh PT. Triconville Indonesia. Pelaksanaan eksekusi tersebut belum memenuhi prosedur eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang memuat bahwa resume telaah eksekusi dibuat dalam waktu 17 hari. Panitera membuat resume telaah eksekusi tersebut dalam waktu 19 hari, dibuat pada tanggal 21 April 2021 sejak permohonan pada tanggal 29 maret 2021, dengan perhitungan mengecualikan hari libur. Penelitian ini memuat saran pentingnya perbaikan aturan prosedur eksekusi dan evaluasi terhadap penyebab keterlambatan serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur dengan berlakunya sanksi sehingga putusan dilaksanakan sesuai prosedur.

Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja.

ABSTRACT

In disputes regarding termination of employment, the disputing parties, both the Worker and the Employer, may reach the stage of filing a lawsuit and undergoing examination at the Industrial Relations Court. The examination of the case at the Industrial Relations Court will result in a Verdict; however, the issuance of a verdict alone does not resolve the issue. In practice, final and binding decisions of the Industrial Relations Court are often not voluntarily executed by the Employer. Furthermore, forced execution by the Court often fails due to financial constraints, difficulties in locating documents related to the assets of the execution respondent, and the Court's failure to carry out the execution request. This study aims to examine the procedure for executing Industrial Relations Court decisions at the District Court and to assess the execution of Decision Number 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg in resolving a dispute over termination of employment.

The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. This legal research focuses on written laws and regulations that are currently in force within society, with the aim of ensuring that legal science, including its discoveries, does not fall into irrelevant poverty. The type of data used in this study is secondary data, while primary data is used as supplementary information. Data is obtained through literature review and field studies at the Semarang District Court. The data is analyzed qualitatively by examining the collected information. The method of data presentation involves editing so that the results of the analysis address the research problems.

The study finds that, first, the execution procedure for Industrial Relations Court decisions in the District Court follows the Civil Procedure Code and the Director General of the General Judiciary Board's Decree Number 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 on Execution Guidelines for District Courts. Second, the execution of Decision Number 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg was carried out on May 6, 2021. The execution involved the payment for September and October 2019 salaries, as well as termination compensation, amounting to IDR 32,446,500 for Diyan Prehantoro and IDR 30,396,500 for Asbat, paid by PT. Triconville Indonesia. However, the execution did not fully comply with the procedural requirements of the District Court, which mandates that the execution review summary be completed within 17 days. In this case, the court clerk prepared the review summary in 19 days, finalized on April 21, 2021, after the request was filed on March 29, 2021, excluding holidays. This study suggests the need for improvements in execution procedure regulations, an evaluation of delays in execution implementation, and stricter enforcement of compliance measures to ensure that court rulings are executed in accordance with established procedures.

Keywords : Execution, Industrial Relations Court Decision, Employment Termination